

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika:
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Effendi, Mashur. 1993. *Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press..
- Starke, J.G. 1997. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Starke, J.G. 2013. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2005. *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Bandung: Alumni.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler: Buku Ajar untuk Mahasiswa*. Malang: Bayu Media..
- Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Thontowi, Jawahir, at-all. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Jurnal Ilmiah/Artikel

- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2010. *“Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Yangoon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961)”*. Jurnal Perspektif Volume XV
- Palenewen, Elisabeth Remillia. 2014. *“Implikasi Yuridis Terhadap Persona non Grata Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961”*. Jurnal *Lex et Societatis*. Volume II Nomor 3 April 2014.
- Sidabutar, Pasulina. 2015. *“Kepentingan Indonesia Membentuk Code of Conduct (CoC) Dengan Australia Tahun 2014”*. Jom FISIP Volume 2 No.2 – Oktober 2015
- Thontowi, Jawahir. 2015. *“Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia”*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.2 VOL. 22 APRIL 2015
- Velicia, Venditha, Wisanjaya I Gede Pasek Eka, dan Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit . *“Perlindungan Hukum Terhadap Indonesia Dalam Kasus Penyadapan Oleh Australia”*. Journal Kertha Negara Vol. 04, No. 02, Februari 2016

C. Skripsi

- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2006. *“Pelanggaran Terhadap Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Yangoon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Muliana, Rizky Pratama. 2018. *“Perang Internet (Netwar) Antara Indonesia dengan Australia Pasca Penyadapan di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Radiasta, I Ketut. 2019 . *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat MH17 Diatas Wilayah Konflik Bersenjata Antara Ukraina*

dan Rusia Berdasarkan Hukum Internasional". Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Setiawan, Rino. 2019. *"Persona Non Grata Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961. (Studi Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia Tahun 1982"*. Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Vembrey, Ellen. 2014. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Hukum Diplomatik (Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

D. Peraturan Perundang-Undangan/Perjanjian Internasional

Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 190

Statute of The International Court of Justice

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional 1961

E. Internet/Website

Kompas.com, *Sabrina Asril. Soal Penyadapan, Duta Besar Australia Bisa Diusir dari Indonesia*. 2013.

<https://nasional.kompas.com/read/2013/11/21/1118425/Soal.Penyadapan.Duta.Besar.Australia.Bisa.Diusir.dari.Indonesia> (diakses pada tanggal 27 oktober 2019)

Kompas.com, *Egidius Patnistik. Langgar Hukumkah bila Australia Sadap Telepon Pejabat Indonesia?* 2013. Tersedia pada <https://internasional.kompas.com/read/2013/12/05/1544349/Langgar.Hukumkah.bila.Australia.Sadap.Telepon.Pejabat.Indonesia> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2019)

DetikNews.com *PM Abbott Tegaskan Tolak Minta Maaf Atas Isu Penyadapan*. 2013. Tersedia pada <https://m.detik.com/news/abc-australia/d-2416906/pm-abbott-tegaskan-tolak-minta-maaf-atas-isu-penyadapan>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

BBCIndonesia.com, Tersedia pada http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131119_indonesiaaussiereaction_shtml (diakses 20 Januari 2020).

JaringNews.com, Tersedia pada <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/52295> (diakses 22 Januari 2020).

Kompas.com, Tersedia pada <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2014/08/28/17412271/.Code.of.Conduct.Ditandatangani.Indonesia-Australia.Sepakat.Tak.Menyadap.> (diakses pada tanggal 22 januari 2020).

Kompas.com, Tersedia pada <https://internasional.kompas.com/read/2013/12/05/1544349/Langgar.Hukumkah.bila.Australia.Sadap.Telepon.Pejabat.Indonesia?page=all> (diakses pada tanggal 20 januari 2020)

